

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(15)	16	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Warga Dadakan Tak Berhak DP 0 Rupiah Pemprov Tidak Bangun Rumah Tapak

Duren Sawit, Warta Kota

Hampir dua bulan setelah groundbreaking proyek rumah own payment (DP) 0 rupiah di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, kini lokasi proyek itu tak banyak dikunjungi oleh warga. Tidak seperti bulan pertama, di mana banyak orang yang datang untuk bertanya-tanya tentang rusun DP 0 rupiah yang diberi nama Klapa Village itu.

Pantauan *Wartakotaonline.com*, Rabu (14/3) sore, lokasi Klapa Village yang berada di Jalan Haji Naman, Poncok Kopi, Duren Sawit, tampak sepi. Hanya ada beberapa petugas keamanan dan sejumlah staf bagian informasi. Tak terlihat warga yang datang melihat show unit.

Di lokasi proyek juga hanya terlihat pondasi-pondasi yang belum terlihat secara utuh menjadi bangunan dan hanya beberapa pekerja proyek saja yang dititikkan masuk.

Dikatakan oleh petugas di lokasi bahwa warga yang datang untuk melihat show unit rumah DP 0 rupiah memang cenderung menurun sebulan terakhir. Mungkin karena sudah banyak warga yang melihat pada awal-awal bulan, seolah groundbreaking dilakukan.

"Sekarang memang sepi. Berbeda dengan bulan lalu. Dulu bisa sehari 500 orang, kalaun sekarang cuma 1 atau 2 orang saja," kata Suradi, salah satu petugas di lokasi, Rabu (14/3).

Namun Suradi mengatakan bahwa warga yang datang biasanya hanya ingin melihat bentuk tipe 36 yang akan segera dibangun. Sedangkan

untuk skema persyaratan kepemilikannya belum bisa dijelaskan.

"Kalau untuk sistem dan besaran cicilan belum dapat dijelaskan, karena hal tersebut baru akan diumumkan pada April mendatang setelah BLJU terbit," ujarinya.

Syarat

Dijelaskan, kemarin Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan syarat-syarat untuk bisa mendapatkan rumah DP 0 rupiah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dikatakan Sandi, warga DKI Jakarta yang sudah memiliki akan diprioritaskan dalam program ini. Prioritas diberikan untuk mengakomodasi pasangan suami-istri atau pun belum pernah memiliki rumah.

Syaratnya sudah merokah. Jadi untuk jomblo, mohor manis, ladi harus punya surat keterangan menikah dari keluarganya," kata Sandi.

Syarat lainnya, calon pembeli harus berdomisili di DKI Jakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang sudah diterbitkan sejak 2013 atau sebelumnya. Hal ini untuk menghindari adanya penduduk denda yang mengikuti program ini.

Prioritas utama adalah orang yang sudah menjadi warga DKI dalam waktu tertentu. Bukan yang dadakan, bukan yang datang ke sini, tiba-tiba, langsung mengikuti," kata Sandi.

Sekin itu, calon pembeli juga belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa penitipan rumah dari pemeringkat pusat maupun daerah, serta telah berusia minimal 21 tahun.

Untuk penghasilan, warga DKI yang bisa mendapatkan rumah DP 0 rupiah adalah

yang berpenghasilan minimal Rp 4 juta dan maksimal Rp 7 juta per bulan. Sumber danaanya bisa gabungan antara suami dan istri.

"Untuk penghasilan, total sampai Rp 7 juta, itu bisa dicampur Rp 7 juta, kalau misalkan gaji UMP. Jadi kalau dua-duanya (suami-istri -Red) beraktifitas, total penghasilannya bisa masuk target rumah DP 0," kata Sandiaga.

Untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal, ia memambahkan, juga bisa mengikuti program ini. Syaratnya, warga tersebut bisa menunjukkan bukti bila penghasilan mereka mencapai Rp 7 juta.

Bukan untuk UMP

Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Agustino Dartimawan, menjelaskan bahwa masyarakat dengan penghasilan UMP DKI Jakarta atau sekitar Rp 3,6 juta tidak dapat mendapat hunian tersebut.

"Kalau program DP 0 Rupiah ini minimal gaji Rp 4 juta, maksimal Rp 7 juta. Untuk yang UMP bisa membeli," ujarnya.

Tidak dapatnya masyarakat berpenghasilan UMP ikut dalam program ini dikarenakan adanya peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan maksimal cicilan sesekrang adalah 30 persen dari penghasilan.

Sedangkan 30 persen dari gaji UMP hanyalah Rp 1.095 rupiah yang artinya tidak bisa memenuhi cicilan program DP 0 rupiah yakni Rp 1,2 juta.

Harus rusun

Agustino juga menjelaskan dasar program DP 0 rupiah tidak bisa berbentuk rumah tapak. Dikatakan, syarat dalam skema fasilitas liku di

tas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tapak adalah Rp 140 juta per unit. "Kenapa kami enggak bangun rumah tapak? Karena harga tanah di Jakarta mahal sekali," ujarnya.

Agustino mencontohkan rumah yang dibangun PT Nusa Kirana di Rorotan, Jakarta Utara. Untuk tanah yang letaknya di pinggiran Jakarta saja masih tidak bisa memenuhi syarat skema FLPP. Agustino mengaku, Rp 140 juta hanya cukup membayai lahannya saja, belum termasuk harga bangunan.

Oleh karena itu, rumah DP 0 rupiah harus berbentuk rumah susun. Rusun menjadi yang paling ideal untuk program rumah DP 0 rupiah dengan skema FLPP.

Meski demikian, kata Agustino, Pemprov DKI mengapresiasi perusahaan swasta yang berupaya membuat rumah murah, contohnya PT Nusa Kirana.

Meski tidak menggunakan skema FLPP, rumah-rumah itu bisa memenuhi kebutuhan rumah terjangkau di masyarakat. "Meski buku skema FLPP itu tetap rumah murah," ucapnya. (m14/jos)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas
Indopos

Sindo
Pos Kota

Tempo

Warta Kota

Warga Dadakan Tak Berhak DP 0 Rupiah Sandi Gandeng Swasta, DPRD Pesimis

Gambir, Warta Kota

Untuk mewujudkan program rumah DP 0 rupiah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengandeng pihak swasta. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno, langkah tersebut dipilih guna mencegah laju pembangunan rumah DP 0 rupiah yang ditecapkan sebanyak 50.000 unit dalam lima tahun masa kepemimpinannya.

Jumlah itu memturnutnya masih sangat jauh dibandingkan dengan kekurangan hunian atau backlog warga Ibu Kota yang mencapai 200.000 hingga 250.000 unit.

"Kita bersama pihak swasta berharap menjalin kerja sama dengan fraksi-faksi bermitra meliputi pemerintah swasta dan bagian kelompok masyarakat dalam konsep penciptaan lapangan kerja," katanya kepada wartawan di Balaikota Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Terkait hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta lewat PD Pembangunan Sarana Jaya telah mengandeng PT Totalindo dalam pembangunan rumah DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kerja

sama tersebut katanya menjadi bukti sinergitas pemkot dan swasta dalam menyejahterakan warga.

Pemprov DKI menargetkan sebanyak 50.000 unit hunian untuk lima tahun ke depan, tetapi angka program ini harus melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Makanya rumah tapak DP Rp 0 di Rorotan (Jakarta Utara) itu harus diapresiasi, karena itu merupakan instansi swasta dalam proses partisipatif," ujar Sandi.

Walau dirinya membuka lebar peran serta pihak swasta untuk berinvestasi dalam program DP 0 rupiah, dirinya mengaku menemui sejumlah kendala, khususnya terkait syarat, cara pembiayaan serta metode jual beli rumah. Oleh karena itu diharapkannya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus rumah DP 0 rupiah dapat segera terbentuk.

Mengada-ada

Sementara itu anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Parlapatan Sinaga, menyebut target pembangunan rumah DP 0 rupiah sebanyak 50.000 unit dalam lima tahun adalah target yang

mengada-ngada. "Yang jelas, program DP 0 rupiah itu mengada ngada. Saya yakni target pembangunan 50.000 saja nggak akan sanggup," katanya saat dihubungi pada Rabu (14/3).

Pedapatan justru mempertanyakan dasar gagasan program rumah DP 0 rupiah. "Pela pertikiran rumah DP 0 rupiah itu tidak tahu dari mana. Realistisnya seperti apa? Ya itulah bagian dari mereka semua," ujarnya.

Terkait langkah Pemprov DKI Jakarta yang bakal mengandeng pihak swasta dalam mengejar target pembangunan rumah DP 0 rupiah, menurut Padapatan, kebijakan tersebut bukan merupakan inisiatif asal ket produk yang dibiasakan tidak memberarkan masyarakat buah.

"Bibilang akan gandeng pihak swasta kalau saya bilang ya silakan saja, yang penting polanya (kerjasama) seperti apa? Karena swasta kan orientasi bisnis, kalau bisnis berarti kemunginan," ungkapnya.

"Jadi jangan dipaksakan; terealisasi tetapi justru memberikan warga," tuturnya. (dw)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas Sindo Tempo
Indopos Pos Kota Warta Kota

Warga Dadakan Tak Berhak DP 0 Rupiah

